

BAB 1

PENDAHULUAN UMUM

1.1 Latar Belakang

Benteng telah menjadi tinggalan arkeologis yang umum dijumpai di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Beberapa benteng diantaranya adalah Benteng Kalamata di Ternate, Benteng Somba Opu dan Benteng Rotterdam di Makassar, Benteng Saksi dan Benteng Kuripan Saka di Lampung Selatan, Benteng Nassau dan Benteng Otahuta di Gorontalo, Benteng Vredenburg di Yogyakarta dan masih banyak lagi yang tersebar di setiap daratan Indonesia (Abbas, 2005; Arafat, 2020; Falah et al., 2021; Jalil, 2020; Marzuki, 2020; Muhaeminah, 2014). Definisi benteng turut beragam menurut masing-masing peneliti, Govaerts (2021), mendefinisikan sebagai struktur penghalang material yang dibangun untuk memperkuat pertahanan suatu tempat, baik dengan modifikasi alam seperti sungai, tebing, maupun konstruksi buatan (Govaerts, 2021). M \ddot{u} th et al. (2016), menekankan benteng sebagai situs permanen berorientasi militer, sedangkan Parkinson dan Duffy (2007), menyatakan benteng sebagai struktur fisik perlindungan dari serangan musuh (M \ddot{u} th et al., 2016; Parkinson & Duffy, 2007).

Fungsi benteng pada masa lalu sangat beragam, mencerminkan kondisi politik, ekonomi, alam, dan sosial selain sebagai pertahanan dari serangan musuh atau ancaman dari satwa liar serta ancaman perburuan budak (Mansyur & Syahrudin, 2006; O'connor et al., 2020). Selain itu benteng juga berperan sebagai pusat administrasi pemerintahan, pos dagang, simbol kekuasaan, dan status sosial (Ballmer et al., 2018; Mansyur, 2015; Marzuki, 2020).

Bentuk benteng sangat beragam, menyesuaikan dengan lokasi, tujuan pendirian, sumber daya, topografi, rute perdagangan, strategi militer, kondisi sosial politik, dan ancaman bencana alam, sehingga menghasilkan variasi teknologi, morfologi, dan komponen yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan masyarakat. Di Indonesia, umumnya benteng terbagi menjadi dua bentuk, yakni poligonal sebagai pengaruh gaya Eropa dengan bastion serta denah yang rapih seperti bentuk segi lima atau *star fort*, dan bentuk tak beraturan (non geometris) dengan ciri benteng tradisional sebagai pengaruh pengetahuan lokal. Mundardjito (2010), mengklasifikasikan benteng di Indonesia sebagai "benteng Nusantara", yakni struktur pertahanan yang dibangun oleh komunitas lokal dengan ancaman dan kondisi lingkungan setempat. Benteng Nusantara terbagi menjadi dua tipe: (1) tipe Eropa, yakni mengikuti desain benteng kolonial Portugis, Belanda, Inggris, dan Spanyol dengan adaptasi lokal, namun tetap menerapkan sistem bastion Vauban abad ke-17 yang mencakup menara, *courtine*, *guardhouse*, *detached fort* dan *citadel*, (2) tipe lokal, yang lebih organik berbasis kebutuhan, ancaman, dan sumber daya masyarakat setempat (Lepage, 2010; Mundardjito, 2010).

Benteng tipe Eropa di Indonesia seperti Benteng Rotterdam dan Kalamata, menerapkan kelima fitur dan klasifikasi konstruksi benteng Vauban *trace italienne*, yaitu: (1) *bastioned towers* untuk menembak area samping dan pengawasan, (2) *courtine* sebagai dinding penghubung dan pos pertahanan, (3) *detached fort* untuk penjaga balik, (4) *citadels* sebagai pusat logistik dan politik, dan (5) *guardhouse* untuk pos penjagaan (Lepage, 2010). Sedangkan benteng lokal Nusantara, diklasifikasikan berdasarkan penempatannya; dataran rendah pesisir pantai untuk pertahanan namun rentan terkena erosi, dataran rendah pedalaman dengan keuntungan akses lahan subur tapi rawan banjir, dan dataran tinggi dengan posisi strategis tapi sulit dikembangkan, sehingga menunjukkan adaptasi masyarakat terhadap ancaman dan kondisi lingkungan setempat (Mundardjito, 2010).

Penempatan benteng Nusantara tidak hanya mencerminkan strategi lokasi, tetapi juga perkembangan periode tertentu yang dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi, militer, politik, dan administrasi sehingga membentuk variasi konstruksi, teknologi, komponen, fungsi, dan tujuan pendirian. Benteng pesisir seperti Sabuga dan Tabuga peninggalan Kerajaan Jailolo, didirikan untuk menghadang serangan dari laut (Mansyur, 2016). Benteng Somba Opu berdiri di dataran rendah untuk memfokuskan pada sektor perdagangan dan akses sumber daya (Muhaeminah, 2014). Kemudian benteng di dataran tinggi yang ada dipemukiman Macapainara di Timor Leste, didirikan sebagai respon terhadap perubahan iklim (El-Nino) dan ancaman eksternal (Lape & Chin-Yung, 2008; McWilliam & Brockwell, 2020). Faktor politik juga menjadi pertimbangan, seperti pada beberapa benteng di Sulawesi Selatan yang mencerminkan konsolidasi kekuasaan, persaingan kerajaan, dan resistensi terhadap kolonial (Bulbeck & Caldwell, 2020). Dengan demikian, benteng bukan hanya struktur pertahanan semata, melainkan cerminan dinamika sosial-ekologis dan politik masa lalu.

Berdasarkan *Inventory and Identification of Fort in Indonesia*, diketahui benteng di Indonesia dibagi menjadi dua kategori, yakni benteng Nusantara dan benteng Kolonial. Berikutnya dua kategori tersebut dibagi dengan beberapa divisi berdasarkan pulau tempat benteng tersebut didirikan, yang terdiri dari divisi Sumatra, Jawa, Bali, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Pembagian divisi menunjukkan perbedaan benteng berdasarkan ciri yang menyesuaikan dengan keperluan dan periode sejarah yang menjadi latar belakang berdirinya benteng di beberapa divisi yang telah disebutkan. Dengan demikian, benteng di Indonesia secara keseluruhan tidak memiliki pola atau aturan baku yang mengikuti standar pada satu konsep konstruksi saja, melainkan setiap benteng memiliki teknologi, bahan material, bentuk, tujuan, fungsi, komponen, dan latar belakang sejarah yang berbeda-beda sehingga menjadikan benteng di Indonesia memiliki keunikan yang bervariasi (Pusat Dokumentasi Arsitektur, 2010).

Pada divisi Sulawesi, terkhusus pada Provinsi Sulawesi Tenggara, ditemukan benteng peninggalan Kesultanan Buton dengan tingkat keberadaan yang tinggi.

Kesultanan Buton pada masa lalu di kenal sebagai kekuasaan Islam yang berdiri sejak abad ke-14 M sebagai kerajaan dan bertransformasi menjadi sistem kesultanan pada abad ke-16 M di bawah pemeritahan Sultan Murhum atau Raja Lakilaponto. Susanto Zuhdi (2010), mengemukakan bahwa Kesultanan Buton menjadi kekuatan penting dalam jalur perdagangan Eropa antara Kerajaan Gowa dan Kesultanan Ternate (Zuhdi, 2010a). Salah satu benteng yang terkenal di kekuasaan ini adalah Benteng Wolio (Benteng Keraton Buton) yang masih dapat ditemui di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Di bangun antara 1578-1615 M oleh Sultan La Elangi (Sritimuryati; Iriani, 2021). Penelitian oleh Balai Arkeologi Makassar (sekarang BPK Wilayah XIX) dan beberapa arkeolog terdahulu telah mengungkap sebaran benteng peninggalan Kesultanan Buton yang membentang dari Pulau Buton, Muna, Kabaena, dan Kepulauan Tukang Besi (Wakatobi), yang secara administrasi Buton masa lampau terbagi menjadi 5 wilayah: Buton/Wolio (sebagai pusat kekuasaan), Barata Muna, Barata Tiworo, Barata Kulisusu, dan Barata Kaledupa (Mansyur et al., 2021; Supriadi, 2021).

Dengan luas yang mencakup Pulau Buton, Poleang, hingga Kepulauan Tukang Besi, menjadikan masyarakat di Kesultanan Buton perlu membangun benteng sebagai sistem pertahanan fisik. Benteng sebagai sistem pertahanan, berfungsi untuk melindungi wilayah kekuasaan Buton dari potensi ancaman yang diberikan oleh Kerajaan Gowa, Kesultanan Ternate, bajak laut Tobelo, dan VOC serta ancaman internal. Sistem pertahanan fisik terdiri dari benteng pusat kekuasaan (termasuk barata) dan benteng pendamping, yang tujuannya amat penting untuk melindungi masyarakat terkhusus wilayah pusat kekuasaan (Aspin, 2019).

Penelitian dengan fokus pada benteng-benteng peninggalan Kesultanan Buton telah beberapa kali dilakukan dengan berbagai aspek kajian, mulai dari sistem pertahanan hingga transformasi budaya. Aspin (2019), dalam tesisnya menjelaskan sisten pertahanan berlapis Kesultanan Buton yang diri dari 4 lapis atau zona, yakni barata (lapis pertama), *matano sorumba* (lapis kedua), *bathin* (lapis ketiga), dan Benteng Wolio (lapis terakhir), yang menggabungkan strategi fisik dan non-fisik untuk mempertahankan kedaulatan kekuasaan (Aspin, 2019). Hasanuddin (2020), melakukan fokus penelitian terhadap Benteng Wabula, Liwu, Kombeli, dan Takimpo yang terdapat di Kabupaten Buton, dan menyimpulkan bahwa beberapa benteng tersebut berfungsi sebagai pusat pemukiman, pemerintahan, dan keamanan sekaligus mencermintakn pergerseran permukiman dari pedalaman perbukitan ke pesisir dataran rendah sebagai respon terhadap perkembangan ekonomi (Hasanuddin, 2020). Mansyur (2021), memfokuskan kajian terhadap fenomena kehadiran benteng di Kepulauan Wakatobi, dengan kemudian mendapati bahwa beberapa struktur benteng berperan sebagai pertahanan maritim terhadap ancaman dari Kesultanan Ternate dan bajak laut Tobelo, sekaligus sebagai simbol identitas maritim masyarakat barata Kaledupa. Kajian terbaru oleh Supriadi (2021), menunjukkan bahwa benteng-benteng Kesultanan Buton tidak hanya berfungsi untuk tujuan militer,

tetapi juga bertujuan sebagai representasi relasi kekuasaan Sultan Buton dalam menghadapi ancaman eksternal (Gowa, Ternate, VOC, dan Tobelo), maupun internal (gesekan antara barata) (Supriadi, 2021).

Beberapa penelitian yang telah dijabarkan telah membahas perihal fungsi, strategi militer, dan simbol kekuasaan pada benteng tinggalan Kesultanan Buton. Namun, terdapat *gap* pengetahuan yang belum cukup untuk menjelaskan pada aspek dimensi waktu yang fundamental dan dapat saling terkait dengan kedua aspek penting lainnya, dalam hal ini bentuk dan ruang dalam arkeologi. Pembagian periode atau periodisasi pada benteng-benteng peninggalan Kesultanan Buton adalah ruang pertanyaan dengan tanda tanya besar yang dapat memberikan gambaran baru dan melengkapi pengetahuan benteng yang ada di Nusantara maupun global dalam skala yang lebih luas. Menurut Müth *et al.* (2016), dalam *Methods of Interpretation*, menyatakan penting dan perlunya kajian periodisasi benteng kuno, oleh sebab kajian tersebut dapat mengungkap transformasi dalam konteks politik, perkembangan sosial, dan budaya manusia yang terkait dengan benteng (Müth *et al.*, 2016). Meski penting dalam mengungkap periodisasi benteng, tantangan utamanya terletak pada penganggulan, karena suatu situs benteng tidak harus dilakukan tindakan ekskavasi dan pertanggalan radio karbon oleh sebab lapisan sejarah pada permukaan benteng yang relatif singkat. Dengan demikian, tinjauan teknologi, survei, atribut/komponen, dan temuan yang terkait dengan benteng menjadi opsi yang menjadi rekomendasi dalam menjelaskan perihal periode atau tahun pendirian suatu situs benteng kuno. Penelitian untuk mengungkap dan membagi periode benteng-benteng Kesultanan Buton memainkan peran penting dalam memahami sejarah, budaya, dan perubahan bentuk benteng dari perspektif teknologi, komponen, dan fungsi dari struktur pertahanan kuno.

1.2 Rumusan Masalah

Benteng sebagai tinggalan budaya pertahanan, menunjukkan beragam fenomena pada masa lampau yang dapat dijelaskan pada masa kini dan bermanfaat bagi masa depan. Sebagai struktur pertahanan, benteng dapat memberikan gambaran tentang perilaku suatu komunitas masyarakat tentang cara mereka menangani konflik, memenuhi kebutuhan, dan ide yang dituangkan hingga menjadi struktur dinding pada masa lalu. Penelitian pada benteng-benteng peninggalan Kesultanan Buton di Sulawesi Tenggara telah cukup banyak dilakukan, dengan beberapa penelitian didominasi pada deskripsi individu benteng. Beberapa publikasi ilmiah seperti jurnal, tesis, dan disertasi telah diterbitkan, dengan beberapa hasil berupa benteng-benteng peninggalan Kesultanan Buton menunjukkan fungsi simbolis, pemukiman, strategi kekuasaan, dan respon terhadap aktifitas maritim yang meningkat (Aspin, 2019; Hasanuddin, 2020; Mansyur *et al.*, 2021; Rosmawati, 2018; Supriadi, 2021). Namun, penelitian untuk mengungkap klasifikasi dan periodisasi benteng di Indonesia, khususnya peninggalan Kesultanan Buton, masih sangat terbatas. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tahapan periode pada benteng-benteng peninggalan Kesultanan Buton?
2. Faktor-faktor apa yang mendasari perubahan pada benteng-benteng peninggalan Kesultanan Buton?

1.3 Hipotesis

Penelitian dengan tujuan mengungkap periode benteng-benteng Kesultanan Buton, dilakukan dengan penalaran deduktif-kualitatif, sehingga memerlukan adanya hipotesis yang bertujuan untuk menduga berdasarkan variabel yang ditentukan. Adapun hipotesis yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Benteng-benteng Kesultanan Buton dapat diklasifikasikan ke dalam tiga periode berdasarkan teknologi, komponen, fungsi, dan konteks historisnya yang dapat dibagi menjadi beberapa periode, yakni pertama abad ke-14-16 M, periode kedua abad ke-16-18 M, dan periode ketiga abad ke-19 M.
2. Perubahan dan perkembangan benteng-benteng di Kesultanan Buton dipengaruhi oleh dinamika internal (sosial-politik, kebijakan pertahanan), eksternal (persinggungan budaya, perdagangan, konflik), dan lingkungan (ketersediaan material).
3. Perkembangan teknologi pertahanan menyebabkan perubahan dalam teknik konstruksi, komponen benteng, dan fungsinya, sehingga membentuk ciri periode tertentu yang dapat diukur/diamati, diidentifikasi dan diklasifikasi.

Benteng-benteng Kesultanan Buton dapat diklasifikasikan ke dalam tiga periode yang berbeda berdasarkan karakteristik teknologi konstruksinya (drystone dan mortar), jenis dan kelengkapan komponen pertahanan (ada/tidaknya bastion, gerbang, meriam), fungsi utama (militer, permukiman, religius, atau campuran), serta konteks historis sosio-politik yang melingkupinya. Beberapa periode dapat diprediksi sebagai berikut: Periode Pra-Kesultanan (sekitar abad ke-14-16 M), Kesultanan Buton (abad ke-16-18 M), dan Kolonial (abad ke-19 M). Perubahan dan perkembangan benteng pada setiap periode ini diduga dipengaruhi oleh dinamika internal (pertimbangan pertahanan) dan faktor eksternal (intensitas konflik dengan kekuatan luar), dan kondisi lingkungan.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini berangkat dari banyaknya variasi bentuk benteng, komponen yang berbeda-beda, fungsi ganda, dan benteng Kesultanan Buton dengan jumlah begitu banyak yang sudah dan menunggu untuk ditemukan. Kondisi yang beragam pada beberapa benteng ini memberikan alasan untuk membaginya menjadi beberapa periode berdasarkan teknologi, komponen, dan fungsi sehingga menjadi suatu ciri tertentu. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjawab tahapan periode dan faktor yang melatar belakangi terjadinya transformasi benteng. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk

mempermudah penentuan kategori periode waktu pada benteng-benteng di Kesultanan Buton.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kebaruan dalam bidang keilmuan, utamanya melengkapi studi pada benteng-benteng kuno peninggalan Kesultanan Buton, juga dapat menjadi rujukan mengenai periodisasi dan ciri khusus benteng berdasarkan teknologi, komponen, dan fungsi yang terikat pada suatu situs benteng sehingga dapat mempermudah kategorisasi. Penelitian tiga periode benteng Kesultanan Buton diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran mengenai pengetahuan, pelestarian, dan konservasi pada tinggalan benteng di Indonesia, sehingga turut dapat memperkuat identitas bangsa.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu, baik yang telah dilakukan oleh peneliti arkeologi, sejarah, dan bidang ilmu lain perihal benteng-benteng di Kesultanan Buton, maka posisi peneliti adalah fokus untuk menjawab pembagian periode yang ditemukan pada masing-masing fenomena benteng yang menjadi objek utama penelitian. Penulis memakai sampel representatif sebagai penentuan objek situs yang akan diteliti berdasarkan beberapa situs benteng yang diduga memiliki indikasi periode tertentu. Meskipun dalam keterangan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX tahun 2023 menyebutkan ada 114 jumlah situs benteng di Sulawesi Tenggara, penulis membatasi pada beberapa situs benteng, antara lain sebagai berikut:

1. Benteng Koncu
2. Benteng Langkawali
3. Benteng Wasidaraki
4. Benteng Wolio
5. Benteng Sorawolio 1
6. Benteng Sorawolio 2
7. Benteng Lipu
8. Benteng Tiworo
9. Benteng Liya
10. Benteng Baadia

1.7 Kebaruan Penelitian

Tidak dapat dipungkiri, penelitian periodisasi benteng telah dilakukan oleh peneliti lain, seperti Bullbeck (1998), yang menjabarkan pembagian periode benteng Kerajaan Gowa menjadi 4 fase. Akan tetapi, periodisasi pada benteng-benteng di Kesultanan Buton belum di ungkap berdasarkan bagaimana tahapan perubahannya, baik berdasarkan tinjauan terhadap teknologi, komponen yang melekat, fungsi, dan pendekatan keilmuan lain yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menjawab tahapan periode benteng-benteng

peninggalan Kesultanan Buton agar dapat menjadi kebaruan dalam kemajuan penelitian benteng tradisional Nusantara. Juga menelitian ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah peneliti lain di masa mendatang dalam menentukan kategori, periode, pertimbangan konservasi, dan memperkaya pengetahuan benteng-benteng tradisional Kesultanan Buton.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Relevan

Masyarakat Nusantara telah lama mendirikan benteng sebagai pertahanan dan pemukiman dengan teknologi dan keunikan yang berbeda-beda, sehingga menciptakan perbedaan teknik, model, komponen, penempatan, bahan baku, dan fungsi. Penelitian arkeologis menunjukkan bahwa benteng di bioregional Wallacea termasuk peninggalan Kesultanan Buton, memiliki karakteristik khusus seperti teknologi, material penyusun, tujuan pendirian, dan konflik politik yang melatar belakungnya (McWilliam & Brockwell, 2020). Umumnya, benteng di wilayah ini bersifat lokal, dibangun oleh masyarakat untuk menghadapi aktivitas perdagangan Eropa di wilayah timur Nusantara pada sekitar abad 16—17 M. Namun, masalah utamanya adalah kurang akuratnya pertanggalan, sehingga alternatifnya adalah mengandalkan perkiraan relatif berdasarkan data sejarah dan tradisi lisan yang dilestarikan oleh masyarakat pendukung.

Penelitian skala disertasi yang dilakukan oleh Supriadi (2021), dengan judul "*Benteng-Benteng Kesultanan Buton: Strategi Kekuasaan Kesultanan Abad ke-16—17 M*" memfokuskan kajian relasi kuasa pada beberapa benteng di Kesultanan Buton, yang meliputi 22 situs benteng. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa benteng-benteng yang tersebar di Kesultanan Buton tidak hanya berfungsi sebagai struktur pertahanan, tetapi juga sebagai representasi kekuasaan, simbol status sosial, dan alat kontrol terhadap wilayah serta rakyatnya. Melalui analisis arkeologis dengan pendekatan teori kekuasaan Michel Foucault, ditemukan bahwa variasi teknologi dan kelengkapan benteng mencerminkan hirarki kekuasaan pemiliknya, di mana benteng yang lebih kokoh dan lengkap menunjukkan kekuasaan yang lebih besar. Letak strategis benteng di pesisir dan ketinggian berfungsi sebagai panoptikon—mengawasi jalur pelayaran serta menunjukkan eksistensi Kesultanan Buton di tengah persaingan kekuatan maritim seperti Portugis, VOC, Ternate, dan Gowa. Sistem kekuasaan Kesultanan Buton bersifat menyebar (desentralistik), tidak hanya terpusat di Benteng Wolio sebagai ibu kota, tetapi tersebar ke berbagai wilayah melalui jaringan benteng. Dengan demikian, benteng-benteng tersebut merupakan bagian dari strategi kekuasaan yang bersifat simbolik, ideologi, dan teritorial dalam menjaga kedaulatan serta pengaruh kesultanan di kawasan Indonesia Timur (Supriadi, 2021).

Penelitian dengan upaya rekonstruksi Benteng Wolio yang dilakukan oleh Swastikawati *et al.* (2022), mengungkapkan bahwa dinding benteng pusat Kesultanan Buton ini menggunakan *matigi* (mortar dari karang laut yang dibakar pada suhu tinggi) sebagai perekat. Teknik yang tidak dapat diulang akibat larangan perusakan terumbu karang, sehingga digantikan dengan mortar semen dan pasir laut untuk konservasi. Analisis XRD, petrografi, dan uji mekanik mortar tiruan tidak hanya memverifikasi kekuatan konstruksi benteng, tetapi juga merancang solusi pelestarian bagi benteng abad ke-16 ini (Swastikawati *et al.*,

2022). Dengan demikian, turut menunjukkan adanya perubahan teknik pendirian benteng yang beralih dari hanya menyusun bertransformasi ke merekatkan per material dinding benteng.

Selanjutnya, penelitian dengan fokus kajian pada benteng-benteng yang berdiri sebelum Kesultanan Buton hadir telah dilakukan oleh Hasanuddin (2020) dalam *“Forts on Buton Island: Centres of Settlement, Government and Security in Southeast Sulawesi”*, mengidentifikasi empat benteng di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton (Benteng Koncu, Liwu, Kombeli, dan Takimpo). Ditemukan bahwa beberapa benteng tersebut memiliki fungsi kompleks sebagai pusat pertahanan, pemukiman, pemerintahan, dan aktivitas keagamaan sejak abad ke-14. Berdasarkan tradisi lisan dan bukti arkeologis, Benteng Koncu sebagai permukiman awal penguasa Buton Wa Kaa Kaa bersifat simbolik-sakral dengan makam dan situs adat, sementara tiga benteng lainnya (Benteng Liwu, Kombeli, dan Takimpo) didirikan di lokasi lebih rendah dekat pesisir seiring dengan perkembangan pertanian dan perdagangan rempah. Benteng Liwu menonjol sebagai pusat perdagangan dan pertahanan dengan bastion di empat sudut, empat gerbang, masjid, meriam, serta jejak interaksi dagang. Sementara Benteng Kombeli dipenuhi makam pemimpin adat meski didapati sekarang banyak struktur yang rusak. Sedangkan Benteng Takimpo yang paling utuh setelah restorasi didapati memiliki masjid, mimbar pelantikan, dan menara pengawas. Penelitian ini mengungkap pergeseran lokasi benteng dari perbukitan ke dataran tinggi strategis sebagai bagian sistem pertahanan berlapis yang mencerminkan tatanan sosial-spiritual masyarakat Buton, sekaligus juga memberikan gambaran bahwa beberapa benteng di pulau Buton telah jauh lebih dulu hadir sebelum Kesultanan Buton berdiri (Hasanuddin, 2020).

Perkembangan penelitian benteng terus berkembang, dengan Mansyur (2021) melakukan fokus kajian terhadap fenomena benteng-benteng di barata Kaledupa (Kepulauan Tukang Besi/Wakatobi), salah satu wilayah otonomi Kesultanan Buton masa lampau. Beberapa benteng yang menjadi objek penelitian adalah benteng Tindoi, Mandati Tonga, Palea, Patua, Taduna, dan Palahidu yang didirikan dengan material batu karang. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa beberapa benteng tersebut berfungsi ganda sebagai pemukiman, pertahanan, dan pusat spiritual masyarakat maritim barata Kaledupa (Mansyur et al., 2021). Penelitian arkeologi-sejarah mengungkap intensitas hubungan maritim melalui temuan keramik Dinasti Ming-Qing, Vietnam, Thailand, dan Eropa (abad ke-15—17), serta mengaitkannya dengan jaringan kekuasaan Kesultanan Buton termasuk hubungannya dengan Benteng Wolio. Temuan ini menunjukkan peran strategi Wakatobi sebagai garis pertahanan timur kesultanan dan simpul jaringan maritim Asia Tenggara, yang tercermin dari ritual maritim dan tradisi lisan yang masih bertahan, sekaligus memperkuat identitas Wakatobi sebagai masyarakat pelaut dengan adaptasi budaya yang unik terhadap dinamika perdagangan rempah dan migrasi regional. Dengan demikian, turut juga

menunjukkan perkembangan konflik yang mendorong pengetahuan pada inovasi benteng.

Penelitian pada benteng barata Kaledupa turut juga dilakukan oleh Nani Somba (2020), dengan fokus utama Benteng Kaledupa dan Benteng Liya. Penelitian ini mengungkap peran strategi kedua benteng tersebut sebagai sistem pertahanan berlapis Kesultanan Buton abad ke-16—17 M, khususnya menghadapi ancaman dari bajak laut Tobelo dan VOC. Melalui survei permukaan dan analisis artefak (meriam, lawa/pintu, fragmen keramik Asia-Eropa, dan makam Kuno), penelitian ini membuktikan fungsi ganda benteng sebagai pusat pertahanan sekaligus permukiman dalam jaringan perdagangan rempah. Kedua benteng yang dibangun dengan teknik susunan baru kapur kering di dataran tinggi ini juga berperan sebagai pusat pemerintahan lokal dan aktivitas keagamaan, ditunjukkan oleh adanya masjid kuno, baruga, makam bangsawan, dan sumur tua (Somba, 2020). Meski temuan keramik Tiongkok, Vietnam, dan Eropa membuktikan keterlibatan Wakatobi dalam perdagangan global, serta gelar "La Ode"/"Wa Ode" menunjukkan integrasi sosial dengan Kesultanan Buton, penelitian ini terbatas pada konteks historis umum tanpa analisis periodisasi spesifik melalui penanggalan artefak atau perbandingan tipologi arsitektur. Temuan ini sekaligus mempertegas identitas masyarakat Wakatobi sebagai pelaut tangguh dengan warisan budaya maritim yang terbentuk melalui adaptasi geografis dan interaksi multikultural selama berabad-abad.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Suseno (2022), yakni mengungkap sistem perbentengan Kesultanan Buton sebagai strategi militer maritim terintegrasi yang menghadapi ancaman dari Kerajaan Gowa (barat) dan Kesultanan Ternate (timur) pada abad ke-16—17 M, dengan terdiri dari empat barata – Muna (Benteng Kotano Wuna), Tiworo (Benteng Tiworo), Kulisusu (Benteng Lipu), dan Kaledupa (Benteng Liya) – berfungsi ganda sebagai pertahanan teritorial dan simbol supremasi sultan yang dilembagakan dalam *martabat tujuh* pada era Sultan Dayanu Ikhsanuddin. Penelitian ini menunjukkan bagaimana benteng-benteng tersebut, bersama Benteng Wolio sebagai pusat politik, membentuk jaringan pertahanan berbasis kekerabatan dan loyalitas yang memungkinkan kesultanan bertahan dari ancaman VOC maupun kekuatan kolonial lain, sebagaimana tercermin dari perannya sebagai tempat perlindungan tokoh seperti Aru Palakka dari Bone (Suseno, 2022).

Penelitian relevan selanjutnya telah dilakukan oleh Aspin (2019), yang menggambarkan Kesultanan Buton membangun strategi pertahanan kompleks berbasis benteng di Kota Baubau dan pembagian strata pertahanan oleh sultan kepada rakyat di pusat pemerintahan maupun wilayah seperti barata. Fokus penelitian berupa pertahanan fisik yakni Benteng Wolio, Sorawolio 1, Sorawolio 2, dan Baadia, menunjukkan fungsi sebagai benteng pengawal pusat pemerintahan. Juga pertahanan non-fisik turut melibatkan kekuatan sosial dan adat masyarakat. Melalui pendekatan arkeologi ruang skala semi-makro dan makro, penelitian ini menegaskan sistem pertahanan Kesultanan Buton adalah

respon terhadap posisi strategis di jalur rempah dan antisipasi dari ancaman eksternal (VOC, Gowa, Ternate, bajak laut Tobelo) (Aspin, 2019). Dengan demikian, kombinasi pertahanan militer, ideologis, dan simbolik ini mencerminkan kearifan lokal yang menjadikan Buton kekyatan maritim penting abad ke-16—17.

Beberapa penelitian yang telah dijabarkan menunjukkan signifikansi penelitian arkeologis pada benteng-benteng Kesultanan Buton, namun belum menunjukkan adanya fokus tinjauan terhadap fenomena perubahan, perbedaan, dan membaginya menjadi periode tertentu. Penelitian tentang benteng Nusantara umumnya terfokus pada analisis fungsi, pola sebaran, strategi pertahanan, dan model arsitektur, namun sering menghadapi kendala dalam menentukan periodisasi akibat terbatasnya data sejarah dan analisis radiokarbon. Kondisi ini memaksa peneliti mengandalkan konteks arkeologis dan tradisi lisan untuk memperkirakan usia benteng. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan berbagai metode pengumpulan data, sebagaimana tercermin dalam beberapa penelitian penting di berbagai belahan dunia. Weksler dan Reich (2011) berhasil mengidentifikasi tiga periode perkembangan benteng di Yerusalem barat daya melalui ekskavasi sistematis dan analisis artefak. Periode pertama (era Islam awal) ditandai dengan struktur pertahanan yang memanfaatkan formasi alam, periode kedua (era Crusader/Ayyubid) menampilkan modifikasi dengan penambahan menara persegi, dan periode ketiga (era Utsmaniyah) menunjukkan penyempurnaan struktur sebelumnya (Weksler-Bdolah & Reich, 2011). Pola serupa terlihat dalam penelitian Snodgrass (2006) di Yunani Kuno yang membagi perkembangan benteng menjadi fase Pra-Arkaik (penekanan pada perlindungan komunitas) dan Arkaik (respon terhadap ancaman politik dan kolonial), menggunakan kombinasi pendekatan arkeologi dan analisis teks sejarah (Snodgrass, 2006). Di Amerika Utara, Dye (2018) mengungkap evolusi benteng kayu masyarakat pribumi yang berkembang sebagai respon terhadap ancaman kekerasan dan kondisi alam. Penelitian ini mengintegrasikan metode geofisika, etnohistori, dan analisis material untuk menelusuri adaptasi teknologi pertahanan dari palisade kayu sederhana hingga struktur yang diperkuat dengan plester dan parit (Dye, 2018). Sementara Mansyur (2015) dalam studi tentang Benteng Amsterdam di Ambon menunjukkan transformasi fungsi dari pos dagang Portugis menjadi benteng pertahanan Belanda, meskipun belum sepenuhnya mengungkap peran konflik dalam perubahan tersebut (Mansyur, 2015).

Berbagai penelitian sebelumnya secara kolektif menunjukkan bahwa periodisasi benteng pada dasarnya merefleksikan dinamika respons masyarakat terhadap: (1) ancaman konflik dan keamanan, (2) perkembangan teknologi, (3) ketersediaan sumber daya, dan (4) perubahan sosial-politik. Temuan ini memiliki relevansi penting untuk kajian benteng di Kesultanan Buton, di mana sistem pertahanannya yang kompleks mencakup jaringan benteng fisik dan stratifikasi sosial pertahanan belum sepenuhnya terpetakan dalam kerangka periodisasi yang jelas. Pendekatan komparatif yang mengintegrasikan metode arkeologi,

sejarah, dan analisis teknologi dapat menjadi kunci untuk mengungkap tahapan perkembangan benteng Buton serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sekaligus berkontribusi pada wawasan yang lebih holistik tentang arsitektur pertahanan Nusantara.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Evolusi Struktural

Penelitian guna menjawab pembagian tiga periode benteng di Kesultanan Buton, memerlukan teori yang relevan, seperti teori yang aplikasikan oleh Laufer (2016), dengan kasus penelitian berupa penekanan pada analisis perubahan struktural dan fungsional bangunan benteng sebagai refleksi dari dinamika sosial, politik, dan lingkungan yang lebih luas. Dengan menggunakan teori evolusi struktural, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana dan mengapa perubahan terjadi seiring waktu, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi adaptasi desain dan penggunaan bangunan di berbagai konteks budaya dan sejarah. Metode ini bukan hanya mengeksplorasi sifat fisik dari benteng, tetapi juga menyelidiki keterkaitan antara perubahan arsitektur dan perkembangan masyarakat yang menghuninya (Laufer, 2016). Teori ini dinilai mampu menjadi pisau analisis guna menjawab fenomena benteng Kesultanan Buton yang berubah berdasarkan dinamika sejarah yang terjadi baik secara lokal maupun global.

2.2.2 Teori Revolusi Urban

Latar belakang yang menjadi faktor perubahan benteng Kesultanan Buton, memerlukan teori revolusi urban yang diterapkan oleh Butterlin dan Rey (2016), dimana penelitian mereka menjelaskan transformasi (perubahan radikal) masyarakat dari sistem subsisten ke sistem sosial-ekonomi yang kompleks dan terstratifikasi pada akhir milenium ke-4 SM. Perubahan ini ditandai oleh munculnya negara-negara kota, pengembangan ekonomi yang terintergasi melalui perdagangan, dan kemunculan arsitektur monumental sebagai simbol kekuasaan dan identitas (Butterlin & Rey, 2016). Teori ini mengimplikasikan bahwa pengembangan sistem pertahanan yang lebih canggih, seperti benteng yang kompleks, tidak hanya merupakan respon terhadap ancaman eksternal, tetapi juga mencerminkan kebutuhan akan pengelolaan sumber daya dan pengaturan sosial yang lebih baik di dalam masyarakat yang semakin terstruktur dan terorganisir. Dengan demikian, teori ini di nilai mampu mengakomodir rumusan masalah penelitian, yakni faktor yang melatar belakanginya terjadinya beberapa periode atau perubahan pada benteng-benteng Kesultanan Buton.

2.3 Kerangka Pikir

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis, penelitian ini bertujuan untuk memahami periodisasi benteng-benteng Kesultanan Buton dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang melandasi perubahan dan perkembangannya. Objek penelitian difokuskan pada kesepuluh benteng terpilih yang tersebar di

beberapa wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis (lihat 1.3), penelitian ini mengadopsi pendekatan holistik yang memadukan survey lapangan, tinjauan pustaka komprehensif, dan dengan memakai analisis teknologi serta kontekstual. Survey lapangan berfokus pada pengidentifikasian dan dokumentasi variabel-variabel kunci yang terdiri dari teknologi, teknik konstruksi, komponen (internal dan eksternal), dan fungsi benteng. Tinjauan pustaka digunakan untuk membangun konteks historis dan teoritis mengenai benteng serta periodisasi. Berikut adalah variabel data periodisasi benteng dengan mengintegrasikan pada rumusan masalah dan hipotesis penelitian:

Tabel 1 variabel data periodisasi benteng

Karakteristik/ Variabel	Periode Pra-Kesultanan	Periode Kesultanan Buton	Periode Kolonial
Teknologi Kontruksi	Drystone (susunan batu tanpa perekat dengan mengandalkan porositas batu karang, material tanpa diolah, dan disusun sehingga berdiri menjadi dinding)	Mortar (menggunakan perekat berupa kapur atau semen lokal/matigi, material melalui proses pengolahan sehingga ukuran batu lebih kecil, dan penyusunan presisi)	Penyempurnaan teknologi periode sebelumnya, dengan indikasi peniruan benteng gaya Eropa
Bentuk / Morfologi	Non-geometris atau semi-geometris, mengikuti kontur alam dan berlokasi di puncak/tebing kars)	Semi-geometris hingga geometris, masih mengikuti kontur permukaan namun dengan penyesuaian bentuk.	Poligonal (meniru benteng Eropa)
Komponen Pertahanan	Sangat terbatas, tidak memiliki struktur bastion (kecuali Benteng Wasidakari), minim gerbang, tidak ada meriam atau struktur pertahanan khusus	Peningkatan dan variasi komponen (bastion, bastion gerbang, gerbang, meriam, masjid, makam, dan batu pelantikan)	Relatif minim namun tetap mempertahankan aspek pertahanan seperti bastion dan meriam.

Fungsi Benteng	Pertahanan pasif, perlindungan dari hewan liar, konflik antar kerajaan tetangga, dan bajak laut, juga tempat pemantauan wilayah (Benteng Langkawali)	Multifungsi, sebagai pertahanan, permukiman, pusat kekuasaan, pusat keagamaan, dan sentra ekonomi	Lebih sederhana dan spesifik sebagai hunian serta pusat pendidikan dengan tetap mempertahankan aspek pertahanan
Konteks Historis / Faktor Pendorong	Masyarakat masih terfragmentasi menjadi beberapa kerajaan kecil/perkampungan tua. Ancaman relatif minim dari konflik internal dan eksternal yang besar	Pembentukan negara dan perkembangan Kesultanan Buton sebagai kekuatan sentral. Meningkatnya ancaman (Kerajaan Gowa, Kesultanan Ternate, VOC, dan Bajak Laut Tobelo, serta konflik internal), pertumbuhan penduduk, kontak dengan Eropa, pengaruh Islam, dan dinamika sosial-politik	Berada pada masa relatif damai, hubungan diplomasi membaik dengan VOC, peningkatan stabilitas politik dan hukum agama yang diperkuat, sembari tetap membawa trauma kolektif yang kuat